

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam pembahasan tentang Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran kode etik Aparatur Sipil negara pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di provinsi Nusa Tenggara Barat). Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek responsibilitas

Secara umum responsibilitas Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan pelanggaran kode etik ASN telah menjalankan 5 responsibilitas, namun hanya 4 responsibilitas yang telah dilakukan dengan baik yaitu, responsibilitas administratif karena semua tindakan didasarkan dengan mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, responsibilitas legal karena sesuai aturan dan hukum yang ada, responsibilitas profesional dan responsibilitas moral yang telah dilakukan dengan baik berdasarkan perbawaslu. Untuk responsibilitas politik tidak maksimal karena Bawaslu tidak memiliki kekuatan politik birokrasi, karena Bawaslu bekerja berdasarkan Hukum.

2. Faktor-Faktor Responsibilitas

Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan pelanggaran kode etik ASN secara pemahaman tanggung jawab dan pemberian wewenang yang diterimanya telah sesuai dan sudah baik, dibuktikan dengan kualitas SDM setiap anggota Bawaslu Provinsi NTB yang mumpuni sesuai bidangnya masing-masing serta berpegang teguh dengan Perbawaslu dan UU Pilkada. Dengan terus melakukan evaluasi dengan tindakan tindakan yang akurat,

adil dan tepat waktu serta didukung dengan komitmen pemimpin yang menjaga dan memperbaiki kualitasnya sebagai lembaga yang independen, berintegritas, profesional dan kredibel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan dijelaskan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi NTB harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya terkait layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ASN, serta meningkatkan fungsi pengawasan pada ASN untuk dapat menekan angka pelanggaran kode etik ASN itu sendiri di Pemilu selanjutnya.
2. Dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik ASN perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan KASN untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran kode etik ASN.
3. Lebih aktif dan konsisten dalam menjaga integritas dan independensinya sebagai lembaga pengawas Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah

- Alijoyo, A. (2019, June 10). *Makna Akuntabilitas dan Responsibilitas: Konteks Manajemen Kepatuhan*. Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI).
- Aman, A., & Triandi, B. (2021). Validasi Formulir Pelanggaran Pemilu Pada Bawaslu Sumatera Utara Menggunakan Qr-Code Dan Base64. *IT (INFORMATIC TECHNIQUE) JOURNAL*, 8(1). <https://doi.org/10.22303/it.8.1.2020.12-22>
- Arrsa, R. C. (2014). *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. <http://www.ppotoda.orgNaskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014>
- Ashkia, D. (2021, November 3). Rakyat dan Haknya dalam Penegakan Electoral Integrity. *Kompasiana.Com*, 1–2.
- Astri, D. ,S, Indarti, S., & Patrisia, E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). In *Jurnal Professional FIS UNIVED* (Vol. 7, Issue 1).
- Azheri, Busyra. (2012). Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. In *Jakarta: Rajawali Pers: Vol. (Issue)*.
- Bawaslu NTB. (2020). *Jumlah Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Pilkada Serentak Tahun 2020*.
- BPS NTB. (2020, April 27). *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2020*. <https://Ntb.Bps.Go.Id>.
- Dewandaru, J. G., Ilham, M., & Arsyad, R. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.378>
- Dharmaningtias, D. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri*, XII(17).
- Dinas PMPD DUKCAPIL. (2022). *Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2021*.
- Farisa, F. C. (2022, May 31). *Aturan ASN Netral di Pemilu: Jenis Pelanggaran dan Sanksinya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/18162091/aturan-asn-netral-di-pemilu-jenis-pelanggaran-dan-sanksinya> Kompas.Com.

- Firmanzah. (2008). *ENHANCING FOREIGN CONSUMER ACCEPTANCE The Role of Capabilities of Creating Export-Market Oriented Products in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)*.
- Fitrianingrum, E. D. (2015). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. 3(5), 1644–1655.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif.teori dan praktik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Humas Kementerian PANRB/UN. (2022, September 22). *Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN dalam Pemilu 2024*. Read More: <https://Setkab.Go.Id/Pemerintah-Terbitkan-Skb-Netralitas-Asn-Dalam-Pemilu-2024/>.
- Hutomo, D. S. (2018). *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11713/Skripsi%20%28Dhima%20Satrio%20Hutomo%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Istianda, M., & Zastrawati, A. (2021). *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar*. *Sebatik*, 25(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1203>
- KASN RI. (2020). *LAPORAN TAHUNAN Komisi Aparatur Sipil Negara 2020 SDM ASN Unggul Indonesia Maju*.
- Maharani, E. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2019 bab 1-3*. <https://repository.ummat.ac.id/1349/1/SKRIPSI%20bab%201-3.pdf>
- Moelong., L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosda karya. *Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- Moleong. (2017). *Moleong. Fenomena Penelitian, Bab iii me*(April 2021).
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*. Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Muhammmad, F. (2017). *Skripsi Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. <https://adoc.pub/skripsi-analisis-hukum-terhadap-pemungutan-suara-ulang-dalam.html>
- Nurkinan. (2018). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019*. *JURNAL POLITIKOM INDONESIA*, 3.
- Oktaviana, M. (2014). *Hubungan Pengawasan Melekat Dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 601–612.

- Pasteur, D. A. (2021). Pentingnya Etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Inspirasi*, 12(2).
- Patilima, H. (2013). Peran Pendidik Pos Paud Dalam Membangun Resiliensi Anak. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7(1).
- Prasetyo, W. (2017). Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah. In *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* (Vol. 2, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Academia Praja*, 4.
- Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter: Kajian Politik ...*, 3(2).
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *CREPIDO*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Sarli, D., Said, F. M., Ameen, A., & Gunawan, I. (2021). Developing Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR) Screening Based on Android Applications. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 11(1). <https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.1.12221>
- Sarofah, R., & Purwaningsih, T. (2017). *Analisis Tata Kelola Pemilukada dalam Perspektif Electoral Integrity di Kota Yogyakarta Tahun 2017*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sirwanto. (2022). *Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Dan Konstitusi Dalam Perspektif Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (Uinfas)]. www.uinfasbengkulu.ac.id
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, D. I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. 3(1), 14–28. <http://nasional.republika>.
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1). <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D). *Bandung: Alfabeta*.

- Sugiyono. (2013). Buku - Sugiyono. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan Pembelajaran. In *Alfabeta* (Vol. 1, Issue 1).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. In *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta*.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Baegaqi Arif, D. (2012). *Demokrasi*.
- Sutmasa, Y. G. (2020). Etika ASN Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.116>
- Tampinongkol, D., Kasenda, V., & Kimbal, A. (2018). *Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus Di Partai P dip Kota Bitung)*.
- Ummah, M. (2020). *Responsibilitas Pelayanan Publik Di Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Luwu Timur*.
- Vanbanjarechts. (2013, January 1). *Prinsip Tanggung Jawab*. Rechts Van Banjar.

Undang-Undang

PP. Nomor 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korp ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 tentang Pilkada

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (7) tentang Pemilihan Umum

Perbawaslu nomor 6 tahun 2017

Perbawaslu nomor 8 tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Perizinan Pengambilan data



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 2370 / II – BRIDA / XII / 2022
TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMMAT Nomor : 1203/II.3 AU/F/XII/2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/2371/XII/R/BKBPDN/2022 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : Bayu Subiyantoro
NIK / NIM : 3506191707990003 /2019B1D018
Instansi : UMMAT
Alamat/HP : Dusun Jerukgulung RT. 002 RW. 001 Desa Jerukgulung Kec. Kandangan Kab. Kediri Prov. Jawa Timur / '082148743401

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)"

Lokasi : BAWASLU PROVINSI NTB
Waktu : Desember 2022 – Januari 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 13 Desember 2022
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi

LALU SURYADI, SP. MM

NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Gubernur Provinsi NTB (Sebagai Laporan)
- Wakil Kota Mataram ,
- Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB
- Yang Bersangkutan,
- Asip.

Lampiran 2. Data yang diberikan Bawaslu NTB

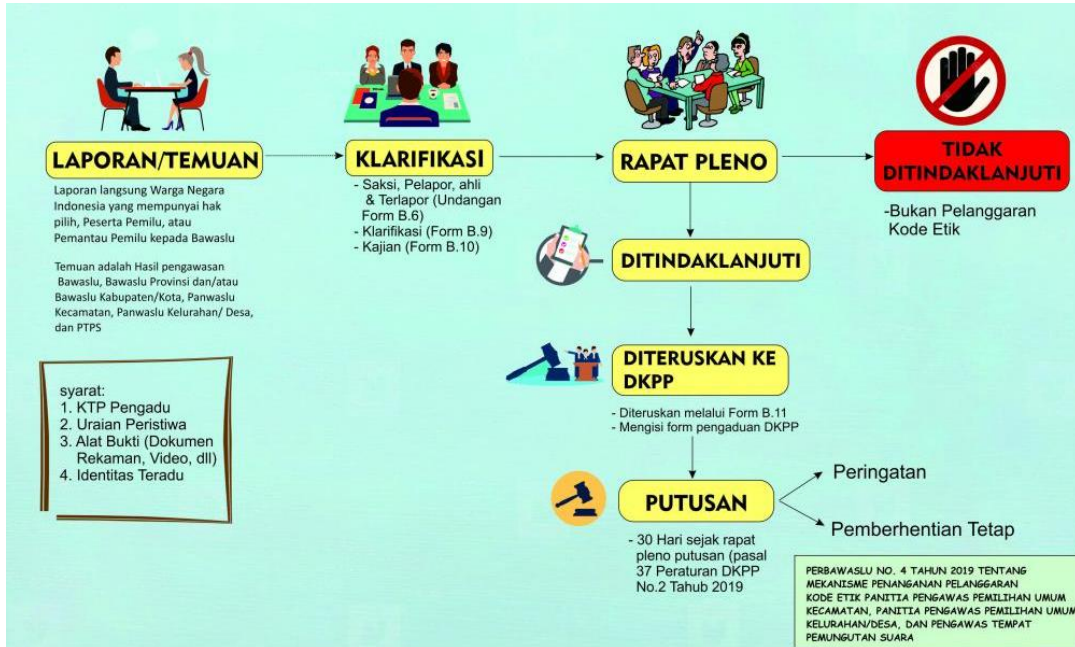
REKAP PELANGGARAN ASN PADA PEMILIHAN SERENTAK 2020										
No	Kab/Kota	DUGAAN PELANGGARAN ASN	DIHENTIKAN	DITERUSKAN	SUDAH DI TINDAK LANJUTI KASN	BELUM DI TINDAK LANJUTI KASN	DINYATAKAN BERSALAH	TIDAK BERSALAH	YANG DI TL PPK	YANG BELUM DI TL PPK
1	KOTA MATARAM	20	1	19	13	6	12	1	11	1
2	KAB LOMBOK UTARA	13		13	7	6	6	1	6	
3	KAB LOMBOK TENGAH	14	4	14	10	1	7	3	3	7
4	KAB SUMBAWA BARAT	10	4	6	2	4	2	0	1	1
5	KAB SUMBAWA	7	2	5	4	1	4	0	2	2
6	KAB DOMPU	38	1	37	15	22	14	1	1	14
7	KAB BIMA	26	0	26	26	0	26	0	26	0
	TOTAL	128	12	120	77	40	71	6	50	25
		140			117		77		75	



Lampiran 3. Data Grafis yang diberikan Bawaslu NTB



Lampiran 4. Gambar alur penanganan pelanggaran kode etik dari Bawaslu NTB



Lampiran 5. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara

	
<p>Wawancara dengan Habibi, SH (Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu NTB)</p>	<p>Wawancara dengan Supardi, SH (Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu NTB)</p>
	
<p>Wawancara dengan Kasubbag Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB, Ida Ayu Wayan Manik, S.STP., MH</p>	<p>Dokumentasi Proses pengkajian penanganan pelanggara kode etik ASN</p>
	
<p>Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Bawaslu NTB</p>	<p>Dokumentasi bersama pengelola laporan duagan pelanggaran Bawaslu NTB</p>

Lampiran 6. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA : Bayu Subiyantoro
2. NIM : 2019B1D018
3. PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan
4. JUDUL SKRIPSI : Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
5. PEMBIMBING AKADEMIK : 1. **Drs. Amil, M.M**
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**

NO	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	MATERI	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
	5-1-23		- Bner secara umum - Pada Bab 3 ada beberapa kesimpulan dibuat		
			dalam kalimat yg ringkas dan to the point dengan susunan materi		
	10-1-23		Isi sudah dengan kesimpulan Ade untuk diri		

PERNYATAAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Bimbingan Proposal Skripsi di Atas Dinyatakan
TELAH SELESAI Pada Tanggal... 10 - Januari ... 2023

Ketua Program Studi

(Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP)
NIDN : 0827118801

Dosen Pembimbing I

(Drs. Amil, M.M.)
NIDN : 0831126204

Lampiran 7. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA : Bayu Subiyantoro
2. NIM : 2019B1D018
3. PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan
4. JUDUL SKRIPSI : Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
5. PEMBIMBING AKADEMIK : 1. Drs. Amil, M.M
2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP

NO	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	MATERI	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
	5-1-23		BAB IV	- Data perlu dipertah - Kurangi pembahasan tidak perlu	U
	6-1-23		BAB IV	- Reduksi data - Analisis lebih dalam	U
	9-1-23		BAB IV	- Analisis Akta	U
	11-1-23		BAB V	- kesimpulan lebih simpel	U
	10-1-23			AL-	U

PERNYATAAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Bimbingan Proposal Skripsi di Atas Dinyatakan
TELAH SELESAI Pada Tanggal 10 Januari 2023

Ketua Program Studi

(Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP)
NIDN : 0827118801

Dosen Pembimbing II

(Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP)
NIDN : 0827118801

Lampiran 8. Berita Acara Ujian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

*Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id*

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun 2023** pukul **10.00 Wita** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan predikat ~~CUKUP/MEUASKAN/SANGAT MEUASKAN~~ **CAM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **Bayu Subiyantoro**
 NIM : 2019B1D018
 Program Studi : Studi Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
 Judul Skripsi : **"Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus DI Provinsi Nusa Tenggara Barat)"**.

Rekap Nilai dari masing-masing Team Penguji sebagai berikut :

No	Nama Team Penguji Skripsi	Jabatan	IP Yg Diberikan
1	Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204	PU	3,74
2	Yudhi Lestana, S.IP., M.IP NIDN. 0827118801	PP	3,88
3	Drs. H. Darmansyah, M.Si NIDN. 0008075914	PN	3,7
TOTAL			

Jumlah IP 10,32
 AI IP -----
 Jmlh Penguji 3 = 3.77

Mataram, 12 Januari 2023

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Utama,	Penguji Pendamping,	Penguji Netral,
 Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204	 Yudhi Lestana, S.IP., M.IP NIDN. 0827118801	 Drs. H. Darmansyah, M.Si NIDN. 0008075914



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Bayu Subiyantoro**

NIM : 2019B1D018

Program Studi : Studi Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Judul Skripsi : **"Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus DI Provinsi Nusa Tenggara Barat)".**

KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,7	7,4	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,8	7,6	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,8	7,6	
4	Methodologi	3	3,7	11,1	
5	Penyajian Data	3	3,7	11,1	
6	Analisa Data	4	3,7	14,8	
7	Kesimpulan	2	3,7	7,4	
8	Konsistensi Bahasan	3	3,8	11,4	
9	Bahasa	2	3,8	7,6	
10	Sikap	2	3,8	7,6	
Jumlah		25		93,6	

TOTAL BN
IP ----- **93,6 = 3,74**
TOTAL B **25**

Mataram, 12 Januari 2023

Penguji Utama,

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Bayu Subiyantoro**
NIM : 2019B1D018
Program Studi : Studi Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus DI Provinsi Nusa Tenggara Barat)"**.

KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	4	12	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	4	8	
8	Konsistensi Bahasan	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
Jumlah		25			

TOTAL BN

97

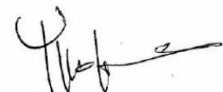
IP

TOTAL B

28

3.88

Mataram, 12 Januari 2023
Penguji Pendamping,


Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Bayu Subiyantoro**
NIM : 2019B1D018
Program Studi : Studi Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : *"Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus DI Provinsi Nusa Tenggara Barat)"*.

KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,8	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,8	7,6	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	3,5	7	
8	Konsistensi Bahasan	3	4	12	
9	Bahasa	2	3,5	7	
10	Sikap	2	4	8	
Jumlah		25		97	

TOTAL BN

IP -----

TOTAL B

Mataram, 12 Januari 2023

Penguji Netral,

Drs. H. Darmansyah, M.Si

NIDN. 0008075914